

KAJIAN PERTUMBUHAN WILAYAH PENGEMBANGAN DI KOTA AMBON (STUDI KASUS : SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN II)

Theresia Silvana Samba Djati¹, Ir. Sonny Tilaar, MSI², & Amanda Sembel, ST, MT, MSc³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

^{2&3} Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : djati.theresia@yahoo.com

Abstrak

Satuan wilayah pengembangan (SWP) adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya. Kota Ambon memiliki lima (V) SWP. Pusat kota merupakan SWP I dengan fungsi kegiatan yaitu pemerintahan, komersial, perdagangan dan jasa serta permukiman. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan kota Ambon dalam hal pemanfaatan ruang dalam kota. Kegiatan yang cenderung berorientasi di pusat kota sehingga menjadikan pusat kota semakin padat perlahan dikembangkan ke arah bagian luar pusat kota dalam hal ini yaitu satuan wilayah pengembangan (SWP) II. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi arah perkembangan wilayah secara spasial pada SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) II dan menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah di SWP II. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kualitatif-Kuantitatif (*Mix Method*). Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi arah perkembangan wilayah pada SWP II dengan menggunakan analisis *overlay* dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota, metode kuantitatif digunakan untuk menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah di SWP II dengan menggunakan analisis *skalogram*, analisis *indeks sentralitas* dan analisis *gravitasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, arah perkembangan spasial Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II yaitu perkembangan horizontal melalui proses perkembangan spasial *sentrifugal*. Lokasi pusat pertumbuhan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II berdasarkan analisis *skalogram* dan analisis *indeks sentralitas* berada di desa Passo. Hasil analisis *gravitasi* menunjukkan interaksi desa/kelurahan yang paling kuat di SWP II yaitu antara Desa Passo dengan Desa Nania, sedangkan yang paling sedikit interaksinya yaitu Desa Passo dengan Desa Latta.

Kata Kunci : Pertumbuhan wilayah, Perkembangan Wilayah, Satuan Wilayah Pengembangan II, Kota Ambon.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Sebagai kota Orde I dalam lingkup wilayah Provinsi Maluku dan pusat wilayah pengembangan/WP Maluku Tengah, Kota Ambon diharapkan dapat memberikan pelayanan perkotaan langsung dan tidak langsung kepada seluruh wilayah provinsi dan khususnya wilayah pengembangan/WP secara hirarkis antara pusat-pusat. Sebagai pusat wilayah pelayanan juga berfungsi sebagai pusat penjalara pertumbuhan dan perkembangan untuk wilayah hinterland, wilayah pengembangan/WP dan provinsi.

Satuan wilayah pengembangan (SWP) adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya. Kota Ambon memiliki lima (V) SWP. Pusat kota merupakan SWP I dengan fungsi kegiatan yaitu pemerintahan, komersial, perdagangan dan jasa serta permukiman. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan kota Ambon dalam hal pemanfaatan ruang dalam kota. Kegiatan yang cenderung berorientasi di pusat kota sehingga menjadikan pusat kota semakin padat perlahan

dikembangkan ke arah bagian luar pusat kota dalam hal ini yaitu satuan wilayah pengembangan (SWP) II.

Satuan wilayah pengembangan (SWP) II berada di kawasan passo dan sekitarnya yaitu dalam lingkup kecamatan Teluk Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon. SWP ini merupakan SWP dengan wilayah terluas diantara empat (4) SWP yang lain dengan luas sekitar 7.164,83 Ha. SWP II memiliki dataran yang cukup luas hingga mencakup Teluk Ambon Bagian Dalam (TAD) dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru di kota Ambon setelah SWP I. selain itu SWP II merupakan lokasi transit dari wilayah sekitar melalui penyeberangan antar teluk dan penyeberangan laut di Halong, Hitu, Liang dan Tulehu, dekat pantai dan memiliki daya tarik wisata. Sebagai satu kesatuan mengingat pengembangan SWP II ke depan dan kelestarian TAD sangat erat terkait dan membutuhkan keterpaduan pengelolaan dan pembangunan maka diperlukan Kajian Pertumbuhan Wilayah Pengembangan di Kota Ambon (Studi Kasus SWP II) sebagai salah satu upaya yang dianggap penting yaitu dengan menetapkan Desa/Kelurahan pusat pertumbuhan yang akan berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan untuk Desa/Kelurahan di sekitarnya. Proses Desa/Kelurahan sebagai pusat pertumbuhan adalah

untuk mendorong perkembangan daerah *hinterland* atau penyangganya, yang menjadikan prasarana sosial ekonomi yang baik serta kemudahan bagi daerah penyangganya untuk berkembang dan selanjutnya mendukung perkembangan desa/Kelurahan itu sendiri sebagai pusat pertumbuhan.

Diharapkan Kajian Pertumbuhan Wilayah Pengembangan di SWP II nantinya dapat membatasi SWP ini dari kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, yang membutuhkan ruang/lahan luas, dan banyak menarik perkembangan lain serta migrasi tenaga kerja, akan tetapi kurang memberikan nilai jual. Selain itu dapat memberikan pelayanan secara merata mengikuti perkembangan kota Ambon.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah perkembangan wilayah di SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) II secara spasial ?
2. Di mana lokasi pusat pertumbuhan wilayah pada SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) II ?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi arah perkembangan wilayah secara spasial pada SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) II.
2. Menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah di SWP II.

KAJIAN TEORI

1. Pola dan Pertumbuhan Kota

Kota-kota tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kekuatan, seperti jaringan transportasi, perluasan industri, perubahan guna lahan, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Perkembangan kota dapat dilihat dalam dua cara (Mirsa 2012:17), yaitu :

a. Perkembangan kota menurut asal pertumbuhan

1. Perkembangan alamiah, yaitu perkembangan kota di masa yang lalu secara alamiah tanpa dilakukan kegiatan perencanaan kota. Dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kota, didasarkan pada kegiatan manusia yang berdasarkan pertimbangan keuntungan sesaat. Infrastruktur dibangun secara tidak teratur, tanpa mempertimbangkan perluasan kota di masa depan. Bentuk kota yang berkembang secara alamiah, antara lain:
 - Penyebaran secara konsentrik (*concentric Spread*), merupakan kecenderungan alamiah di mana orang lain ingin sedekat mungkin dengan pusat kota, dan sebagai wujudnya adalah kota berkembang

berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Permasalahan yang ditimbulkan meliputi kemacetan lalu lintas, jalan-jalan sempit, konsentrasi penduduk dan lain sebagainya.

- Pengembangan berbentuk pita (*Ribbon Development*). Pada umumnya, perkembangan berbentuk pita terjadi sebagai akibat peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Secara alamiah, kecenderungan setiap orang membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur utama. Jika tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain:
 1. Peningkatan biaya pelayanan prasarana dasar,
 2. Perbaikan pelayanan di masa depan menjadi mahal dan sulit,
 3. Kegiatan yang ada akan terkena dampak arus lalu lintas yang tinggi (kebisingan, polusi udara, debu dan lain-lain),
 4. Berpeluang terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas,
 5. Kapasitas lalu lintas dan efisiensi pada jalan utama berkurang.
- Pertumbuhan berbentuk satelit (*satellite growth*). Pertumbuhan kota satelit terjadi apabila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu, yang berkembang di sekitar kota utama (metropolitan) dan secara sosial-ekonomi masih bergantung pada kota induknya. Permasalahan yang terjadi umumnya berkaitan dengan akses terhadap kota induknya.
- Pertumbuhan secara terpecah (*scattered growth*). Pertumbuhan kota berlangsung dengan pola yang tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas, masuknya kegiatan industri dalam lingkungan permukiman, munculnya kawasan kumuh kurangnya ruang terbuka (taman). Bila tidak terkendali, persoalan ini akan sulit dipecahkan di masa depan.
- 2. Perkembangan yang direncanakan, yaitu kota berkembang berdasarkan acuan/rencana yang telah disusun oleh perencana kota. Keseluruhan pertumbuhan kota dikendalikan melalui aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kota memperhatikan distribusi berbagai aktivitas secara rasional untuk menghindari terjadinya konflik di masa depan. Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kota didasarkan pada kebutuhan di masa depan.

2. Ruang

Meningkatnya tuntutan akan ruang di kota, baik karena dipicu oleh tuntutan meningkatnya permukiman maupun tuntutan meningkatnya bangunan-bangunan untuk mengakomodasikan kegiatan telah

mengakibatkan munculnya dua konsekuensi spasial yang harus diperhatikan dalam rangka untuk mencermati dinamika kehidupan kota (Yunus 2011; 58). Hal ini sangat menjadi penting peranannya dalam rangka upaya mengelola perkembangan spasial kota itu sendiri (*spatial urban management*). Konsekuensi spasial yang dapat diamati adalah *konsekuensi keruangan secara fisik* dan *konsekuensi keruangan secara yuridis-administratif*.

1. konsekuensi spasial secara fisik

a. proses perkembangan spasial secara horizontal

suatu proses penambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan cara menempati ruang-ruang yang masih kosong baik di daerah pinggiran kota maupun di daerah-daerah bagian dalam kota. Perkembangan keruangan secara horizontal terdiri dari :

- proses perkembangan spasial sentrifugal
proses ini tidak lain adalah suatu proses bertambahnya ruang kekotaan yang berjalan ke arah luar dari daerah kekotaan yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran kota. Proses inilah yang memicu dan memacu bertambah luasnya areal kekotaan. Makin cepat proses ini berjalan, makin cepat pula perkembangan kota secara fisik.

- proses perkembangan spasial sentripetal

proses perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi di bagian dalam kota (*the inner parts of the city*). Proses ini terjadi pada lahan-lahan yang masih kosong di bagian dalam kota, baik berupa lahan yang terletak di antara bangunan-bangunan yang sudah ada, maupun pada lahan-lahan terbuka lainnya.

b. proses perkembangan spasial secara vertikal

Gejala perkembangan spasial kota secara vertikal adalah proses penambahan ruang kota dengan menambahkan jumlah lantai bangunan pada bangunan tertentu sehingga luas lantai bangunan akan semakin luas seiring dengan bertambah banyaknya lantai bangunan tersebut.

2. konsekuensi spasial secara yuridis administratif

Wacana ini muncul sebagai akibat perkembangan fisik spasial kota dari waktu ke waktu, khususnya perkembangan spasial horizontal sentrifugal. Perkembangan spasial horizontal sentrifugal ini, telah mengakibatkan terjadinya perubahan batas-batas fisik morfologi kekotaan. Perubahan-perubahan mana mempunyai dimensi kewaktuan yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan dimensi kewaktuan untuk perubahan batas-batas yuridis administratif kota.

3. Teori dan Faktor-faktor Perkembangan Kota

Perkembangan kota secara umum menurut *Branch* (1995) sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi

internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif. Unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah :

1. Keadaan geografis yang mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, di pertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai, misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut.
2. Tapak (*site*) merupakan faktor-faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang dipertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi di dataran yang rata akan mudah berkembang ke semua arah, sedangkan yang berlokasi di pegunungan biasanya mempunyai kendala topografi.
3. Fungsi kota juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota-kota yang memiliki banyak fungsi, biasanya secara ekonomi akan lebih kuat dan akan berkembang lebih pesat daripada kota berfungsi tunggal, misalnya kota perdagangan, biasanya juga berkembang lebih pesat dari pada kota berfungsi lainnya.
4. Sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota.
5. Unsur-unsur umum, misalnya jaringan jalan, penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum akan menarik kota ke arah tertentu.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu:

1. Kota sebagaimana biasanya mempunyai fungsi primer dan sekunder yang tidak terlepas dari keterkaitan dengan daerah lain apakah itu dipandang secara makro (nasional dan internasional), maupun secara mikro regional dengan daerah atau wilayah yang ada di sekitarnya, dimana keterkaitan ini akan menimbulkan arus pergerakan orang dan barang yang tinggi memasuki kota secara kontinuitas.

Secara garis besar menurut *Northam* dalam Yunus (2000) penjalaran fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: perkembangan memusat,

perkembangan memanjang mengikuti pola jaringan jalan dan perkembangan meloncat membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif-kuantitatif (Mixed Method). Mixed Method adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010: Viii). Tujuan strategi ini adalah untuk mengidentifikasi arah perkembangan wilayah melalui analisis data kualitatif dan menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah menggunakan analisis data kuantitatif. Sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliabel dan objektif dibandingkan hanya dengan menggunakan salah satu metode penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan saat penelitian yaitu :

1. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yaitu peneliti melakukan kajian kepustakaan menyangkut Pertumbuhan wilayah Pengembangan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) pada suatu kota/kabupaten.
2. Wawancara
Pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, yaitu instansi pemerintahan BAPPEDA kota Ambon, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon, Badan Pertanahan Nasional kota Ambon, Badan Pusat Statistik kota Ambon, Balai Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara, dan Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
3. Observasi/Pengamatan
Observasi dilakukan di wilayah penelitian mencakup keseluruhan Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon Desa Hunuth di kota Ambon.

Teknik Analisis Data

1. Pengolahan Data

Untuk teknik pengolahan data, peneliti menggunakan teknik pengolahan data matematis dengan menggunakan *Mc.Excel* 2013 dan Sistem

Informasi Geografi (ArcGis 10) untuk pengolahan data spasial. Dua model data yang menggambarkan data spasial di dalam GIS yaitu Vektor dan Raster.

2. Metode Analisis

Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi arah perkembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II dan menentukan lokasi pusat pertumbuhan di SWP II. Untuk mencapai tujuan yang pertama peneliti menggunakan metode analisis *overlay*. Untuk mencapai tujuan yang kedua peneliti menggunakan metode analisis *Skalogram*, analisis *Indeks Sentralitas* dan analisis *Gravitasi*.

1. Analisis *Overlay* adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). *Overlay* yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, *overlay* menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut (Prahasta, 2007). Dalam penelitian ini analisis *overlay* yang digunakan yaitu dengan menggabungkan beberapa peta untuk mengetahui arah perkembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II di kota Ambon. Peta tersebut antara lain peta Google Earth tahun 2010, 2013 dan 2015..
2. Analisis *skalogram*, metode ini memberikan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan (Lutfi Muta'ali, 2015). Analisis *skalogram* pada penelitian ini berdasarkan 4 jenis fasilitas yang terdiri atas 16 objek, yaitu:
 - a. Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi)
 - b. Fasilitas Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu)
 - c. Fasilitas Peribadatan (Masjid, Gereja)
 - d. Fasilitas Ekonomi (Pasar, Hotel, Bank, SPBU, Terminal, Pelabuhan)

Lebih lanjut dalam perhitungan metode ini dikenal cara penyusunan tabel skala Guttman dengan tahapan sebagai berikut : 1) menyiapkan matriks data dasar yang mengandung jumlah objek penelitian dengan jumlah variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan masyarakat; 2) perhitungan dengan menggunakan titik potong (*cutting point*). Titik potong adalah suatu nilai tertentu (ditentukan) untuk menetapkan batas antara kelompok-kelompok objek penelitian yang memperlihatkan tingkatan tiap objek penelitian ditentukan oleh besarnya jumlah variabel

yang dimiliki pada objek-objek penelitian tersebut. Setelah pengelompokan terbentuk, maka dapat dihitung persentase kelengkapan fasilitas ini yaitu menghitung jumlah jenis fasilitas yang dimiliki oleh wilayah dibandingkan dengan jumlah jenis keseluruhan fasilitas. Menganalisis banyaknya kelas dari masing-masing Desa/Kelurahan sebagai pusat pertumbuhan, digunakan metode *Sturges* (Tarigan, dalam Masiun 2012) dan (Saruhian, dalam Masiun 2012), dengan rumus sebagai berikut:

$$K = 1 + 3.3 \text{ Log } n$$

Selanjutnya menentukan besarnya interval kelas, dengan cara:

$$I = \frac{A-B}{K}$$

Di mana:
 I = Interval
 K = Banyaknya kelas
 n = Banyaknya Desa/Kelurahan
 A = Jumlah fasilitas tertinggi
 B = Jumlah fasilitas terendah

3. Analisis indeks sentralitas (*Centrality Indeks Analysis*) merupakan langkah lanjutan dari analisis skalogram. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Lutfi Muta'ali, 2015). Perbedaan indeks sentralitas dan skalogram adalah bahwa pada alat ini dilakukan penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut juga dengan indeks sentralitas berbobot. Pengukuran tingkat sentralitas didasarkan pada jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan pada suatu wilayah berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada suatu wilayah terkait. Dalam penelitian ini, nilai sentralisasi gabungan dipilih 100. (2) pembobotan terhadap jumlah unit fasilitas (C), yang disebut sebagai nilai sentralitas fasilitas, dengan rumus sebagai berikut (Marshall, 1986) :

$$C = (x/X)$$

Keterangan
 C = bobot atribut fungsi x
 x = Nilai sentralitas gabungan = 100 (contoh)
 X = jumlah total atribut dalam sistem

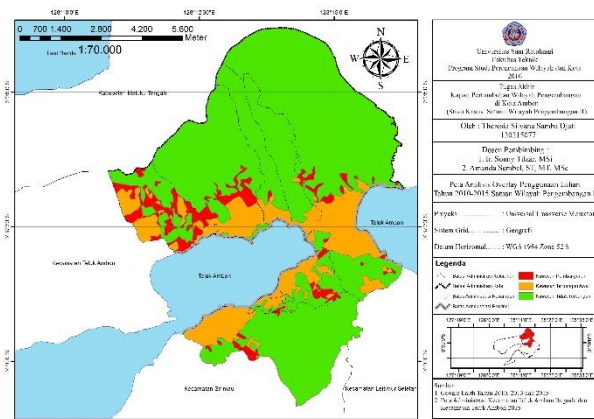
Berdasarkan pembobotan tersebut maka dapat dihitung nilai keterpusatan fasilitas suatu wilayah dengan cara :

- Mengalikan nilai sentralitas fasilitas dengan jumlah unit fasilitas yang bersangkutan dari setiap kota.
 - Menjumlahkan hasil perkalian tersebut untuk tiap kota. Hasil penjumlahan ini yang disebut nilai keterpusatan fasilitas.
 - Melakukan klasifikasi hirarki wilayah berdasarkan urutan nilai sentralitas
4. Analisis gravitasi adalah suatu teknik untuk menganalisis pola interaksi ruang, Menurut *Blakely* (1994), penggunaan teknik ini akan dapat menghitung kekuatan relatif dari hubungan antar wilayah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah Perkembangan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II

Dalam mengidentifikasi arah perkembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II di kota Ambon peneliti menggunakan analisis *overlay*. Berikut merupakan peta hasil analisis *overlay* dari tahun 2010-2015 di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II :



Gambar 1. Peta Hasil Analisis *Overlay* Tahun 2010-2015 di SWP II
 Sumber : Penulis, 2016

Berdasarkan peta hasil analisis *overlay* tahun 2010-2015 di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II, luas lahan kawasan pembangunan ±417,71 Ha, luas kawasan terbangun awal ± 1165,68 Ha dan luas kawasan tidak terbangun ± 4987,69 Ha.

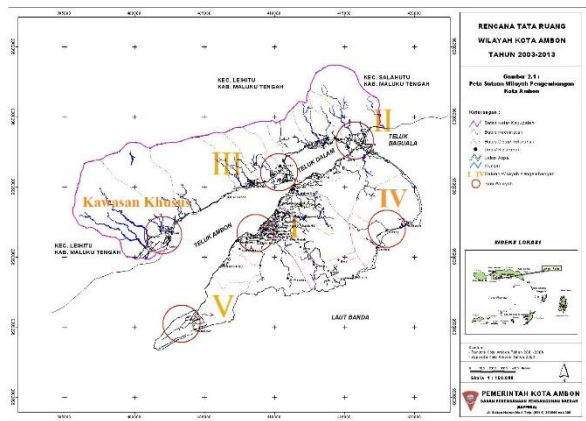
Untuk mengetahui arah perkembangan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II juga dapat dilakukan melalui analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembangan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II, berupa faktor internal dan faktor eksternal. Berikut faktor internal

yang mempengaruhi perkembangan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II :

- Keadaan Geografis

Kota Ambon memiliki empat (4) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). SWP II merupakan SWP yang diapit oleh SWP I, SWP III dan SWP IV. Dengan posisi yang strategis karena keberadaannya terletak di tengah-tengah, SWP ini memiliki aksesibilitas yang tinggi karena mudah dicapai dari berbagai arah. SWP II juga merupakan tempat pertemuan jalur transportasi regional yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah (SWP I) dengan sub pusat kegiatan wilayah (SWP) II. Berdasarkan pertimbangan keadaan geografis, tingkat aksesibilitas yang tinggi, pertemuan jalur transportasi regional dan lokasi transit dari dan menuju wilayah sekitar, meliputi antar kota Ambon dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten

Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tengah, mengakibatkan terjadinya perkembangan ke segala arah dalam artian perkembangan terjadi pada lahan yang belum terbangun pada SWP ini.



Gambar 2. Peta Satuan Wilayah Pengembangan di Kota Ambon

Sumber : RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

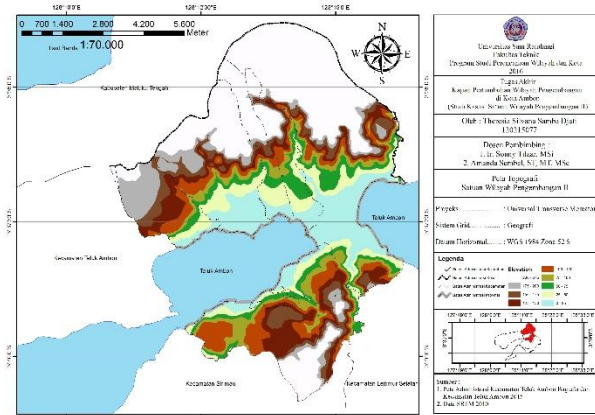
- Tapak (site)

Tabel 1. Klasifikasi Ketinggian Relief

Ketinggian	Kategori
<50 m	Dataran rendah
50-200 m	Perbukitan rendah
200-500 m	Perbukitan
500-1000 m	Perbukitan tinggi
>1000 m	Pegunungan

Sumber : Zuidam, 1985

Kondisi topografi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II sebagian besarnya merupakan dataran rendah dan perbukitan rendah. Untuk perbukitan dan perbukitan tinggi berada di ujung utara dan ujung selatan SWP ini. Dengan kondisi topografi yang sebagian besarnya merupakan dataran rendah dan perbukitan rendah akan memudahkan SWP II untuk berkembang. Berikut merupakan peta topografi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II :



- Demografi

Padatnya penduduk di suatu wilayah umumnya menandakan wilayah tersebut sedang berkembang dan dapat menghidupi penduduk di dalamnya. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di SWP II dari tahun 2010-2015 :

Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di SWP II

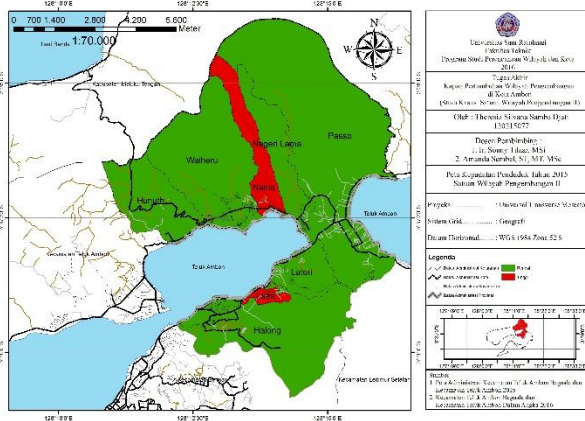
Nama Desa	Luas (Km ²)	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Halang	16	9720	608	9991	624	10404	650	11143	696	11606	725	12081	755
Latta	0,1	1658	16580	1704	17040	1774	17740	1900	19000	1979	19790	2060	20600
Lateri	2,01	5183	2579	5327	2650	5546	2759	5939	2955	6187	3078	6441	3204
Passo	11,38	20681	1817	21254	1868	22130	1945	23700	2083	24687	2169	25698	2258
Negeri													
Lama	4,5	1999	444	2054	456	2139	475	2291	509	2387	530	2483	552
Nana	0,12	3737	31142	3840	32000	3999	33325	4282	35683	4461	37175	4643	38692
Waheru	6	9892	1649	10783	1797	11227	1871	12024	2004	12524	2087	13036	2173
Hanuh	2	2776	1388	2843	1422	2960	1480	3170	1585	3302	1651	3437	1719

Sumber : Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon dalam Angka 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Desa/Kelurahan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II dari tahun 2010-2015 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Desa Passo, dan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu desa Latta. Berdasarkan

perhitungan jumlah penduduk dibagi luas wilayah maka di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II desa Nania dan Desa Latta merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi diantara desa/kelurahan lainnya. Kepadatan penduduk desa Nania yaitu 38692 Km² dan kepadatan penduduk Desa Latta yaitu 20600 Km².

Gambar 4. Peta Kepadatan Penduduk di SWP II



Sumber : Penulis, 2016

- Sejarah dan Kebudayaan

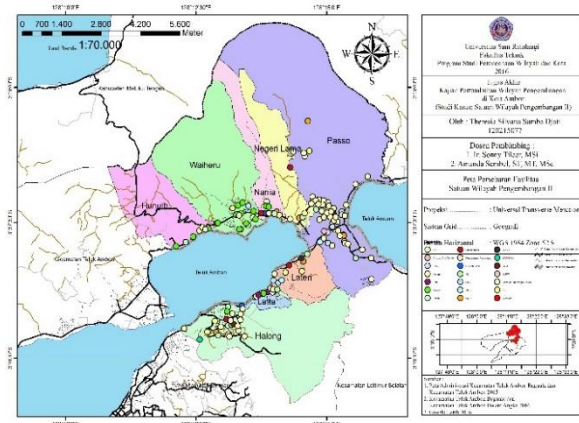
Berdasarkan kondisi eksisting di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II, hampir sebagian besar masyarakatnya tidak memiliki kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang dihindari untuk dilakukan perkembangan. Semua desa/kelurahan di SWP II dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan yang ada. Tidak ada negeri adat yang melarang perkembangan wilayah ini yang terpenting pembangunan, pembebasan lahan, pengambilan material dsb harus sesuai aturan yang ada dan tidak merusak lingkungan.

Desa/kelurahan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II seluruhnya merupakan desa swadaya berkategori maju. Artinya semua desa di SWP ini mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengadakannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka perkembangan di SWP II jelas akan menyebar ke berbagai arah yang dianggap layak untuk dikembangkan.

- Fasilitas Pelayanan Umum dan Pelayanan Sosial

Desa Passo merupakan desa yang memiliki fasilitas dengan jumlah terbanyak. Berikut merupakan peta persebaran fasilitas di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II :

Gambar 5. Peta Persebaran Fasilitas di SWP II



Sumber : Penulis, 2016

Fasilitas-fasilitas yang ada tiap desa/kelurahan menggambarkan arah perkembangan SWP ke berbagai arah mengikuti pola jaringan jalan. Selain itu penyebaran fasilitas di SWP ini sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya yang sebagian besar berupa dataran rendah dan perbukitan rendah.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu :

- Fungsi kota

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan sekunder di kota Ambon selain itu untuk pelayanan kegiatan kota SWP II sebagai sentra sekunder I. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh SWP I dapat dikembangkan oleh SWP II dan diharapkan SWP II dapat melayani daerah Ambon Bagian Timur. Pergerakan dan aksesibilitas yang tinggi dari segala arah mengakibatkan perkembangan SWP II terjadi melebar ke bagian-bagian dalam wilayah yang masih kosong hingga di pinggiran wilayah SWP II.

Hasil analisis *overlay* tahun 2010-2015 dan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II menunjukkan adanya Konsekuensi spasial secara fisik dengan proses perkembangan spasial di SWP II secara horizontal. Perkembangan spasial secara horizontal yaitu suatu proses penambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan cara menempati ruang-ruang yang masih kosong baik di daerah pinggiran maupun di daerah-daerah bagian dalam SWP. Pola persebaran kegiatan kota di Satuan Wilayah Pengembangan II yaitu pola sentralisasi di mana kegiatan yang terjadi cenderung berkumpul atau berkelompok pada suatu daerah atau wilayah utama yaitu desa Passo (karena memiliki

jumlah dan jenis fasilitas yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya).

Perkembangan SWP II secara horizontal yaitu melalui proses perkembangan spasial sentrifugal. Proses ini tidak lain adalah suatu proses bertambahnya ruang SWP yang berjalan ke arah luar dari daerah yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran. Proses inilah yang memicu dan memacu bertambah luasnya areal terbangun SWP II. Makin cepat proses ini berjalan, makin cepat pula perkembangan secara fisikal.

Berdasarkan arah perkembangan di SWP II dari peta hasil analisis *overlay* dan hasil analisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, yaitu di SWP II terjadi penjalaran fisik yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjalaran yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan wilayah yang disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier. Arah perkembangan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II lebih banyak mengarah ke arah utara.

2. Menentukan Lokasi Pusat Pertumbuhan Wilayah di SWP II

Untuk menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah di SWP II peneliti menggunakan analisis *skalogram*, analisis *indeks sentralitas* dan analisis *gravitasi*. Ketiga analisis tersebut akan menghasilkan hirarki pusat pelayanan yang kemudian akan menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah dan akan mengukur kekuatan interkasi antar wilayah di SWP II yaitu daerah pusat dan hinterland.

1. Analisis Skalogram

Berikut merupakan hasil analisis skalogram di SWP II :

Tabel 3. Hasil analisis *skalogram*

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Fasilitas														Jumlah	Persentase	Hirarki			
		TK	SD	SNP	SMAN/SMK	Akademi/Perguruan Tinggi	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Majelis	Gereja	Pasar	Hotel	Bank	SPBU				Terminal	Pelabuhan	
Halong	12081	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	12	16,05%	I
Lata	1060	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	6,25%	IV
Lateri	6441	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	7	11,11%	I
Passo	25698	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20,63%	I
Negeri Lama	2483	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6,35%	IV
Nania	4643	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	14,39%	II
Waiheru	13036	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	12,70%	IV
Hunuth	8437	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	9,52%	IV
Jumlah	68719	7	8	5	4	3	3	3	4	6	8	3	2	1	2	1	3	63	100%		

Sumber : Penulis, 2016

Desa Passo dan Desa Halong merupakan Desa dengan hirarki I, Desa Nania menjadi Desa dengan hirarki II, hirarki III yaitu Kelurahan Lateri dan desa Waiheru serta hirarki IV yaitu Desa Latta, desa Negeri Lama dan desa Hunuth. kelengkapan fasilitas yang berbeda di tiap Desa/Kelurahannya akan mempengaruhi hasil analisis *skalogram*. Sehingga juga mempengaruhi hirarki dari tiap Desa/Kelurahan tersebut.

2. Analisis Indeks Sentralitas

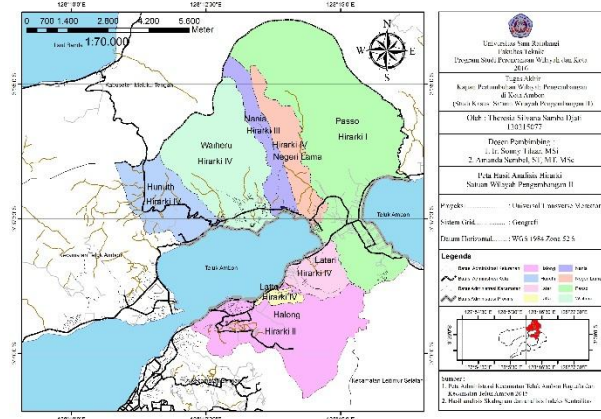
Hasil analisis *indeks sentralitas* menunjukkan Desa Passo merupakan Desa Hirarki I yang berarti merupakan lokasi pusat pertumbuhan wilayah di SWP II. Desa Passo memiliki kelengkapan fasilitas dan bobot nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lain. Kualitas fasilitas-fasilitas di desa Passo berdasarkan survey lapangan pun dalam kondisi sangat baik dan layak untuk digunakan masyarakat umum. Berikut merupakan hasil analisis *indeks sentralitas* di SWP II :

Tabel 4. Hasil analisis *indeks sentralitas*

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Fasilitas														S	Hirarki wilayah			
		TK	SD	SNP	SMAN/SMK	Akademi/Perguruan Tinggi	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Majelis	Gereja	Pasar	Hotel	Bank	SPBU			Terminal	Pelabuhan	
Halong	12081	14	12,5	20	25	33,33	33,3	25	33,33	16,67	12,5	0	50	0	0	0	0	33,33	389	II
Lata	1060	0	12,5	0	0	0	0	0	0	16,67	12,5	0	50	0	0	0	0	0	92	IV
Lateri	6441	14	12,5	20	25	0	0	0	0	0	12,5	0	0	50	0	0	0	33,33	167	IV
Passo	25698	14	12,5	20	25	0	33,3	25	33,33	16,67	12,5	33,3	0	100	50	100	0	0	476	I
Negeri Lama	2483	14	12,5	20	25	0	0	0	0	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0	94	IV
Nania	4643	14	12,5	20	0	33,33	33,3	25	0	16,67	12,5	33,3	0	0	0	0	0	0	204	III
Waiheru	13036	14	12,5	0	25	0	0	25	33,33	16,67	12,5	33,3	0	0	0	0	0	0	172	IV
Hunuth	8437	14	12,5	0	0	33,33	0	0	0	16,67	12,5	0	0	0	0	0	0	33,33	122	IV
JFT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Sumber : Penulis, 2016

Gambar 6. Peta hasil analisis *skalogram* dan *indeks sentralitas*



Sumber : Penulis, 2016

3. Analisis Gravitasi

a. Interaksi Desa Passo dengan Desa Halong

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J^b_{12})$$

$$I_{12} = (25698 \times 12081) / 4^2$$

$$I_{12} = 19403596,13$$

- b. Interaksi Desa Passo dengan Desa Latta

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 2060) / 4^2$$

$$I_{12} = 3308617,5$$

- c. Interaksi Desa Passo dengan Kelurahan Lateri

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 6441) / 3^2$$

$$I_{12} = 18391202$$

- d. Interaksi Desa Passo dengan Desa Negeri Lama

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 2483) / 1,50^2$$

$$I_{12} = 28359170,67$$

- e. Interaksi Desa Passo dengan Desa Nania

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 4643) / 2^2$$

$$I_{12} = 29828953,5$$

- f. Interaksi Desa Passo dengan Desa Waiheru

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 13036) / 5^2$$

$$I_{12} = 13399965,12$$

- g. Interaksi Desa Passo dengan Desa Hunuth

$$I_{12} = G (P_1 P_2 / J_{12}^b)$$

$$I_{12} = (25698 \times 3437) / 4^2$$

$$I_{12} = 5520251,625$$

Seperti pada hasil perhitungan analisis gravitasi di atas, yang paling kuat interaksinya dengan Desa Passo adalah Desa Nania dengan nilai 29828953,5. Kedua Desa Negeri Lama dengan nilai 28359170,67. Ketiga Desa Halong dengan nilai 19403596,13 dan kekuatan interaksi paling sedikit adalah Desa Latta dengan nilai 3308617,5.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Arah perkembangan spasial Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II yaitu perkembangan horizontal melalui proses perkembangan spasial sentrifugal. Proses ini tidak lain adalah suatu proses bertambahnya ruang SWP yang berjalan ke arah luar dari daerah yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran. Arah perkembangan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II lebih banyak mengarah ke arah utara.
2. Lokasi pusat pertumbuhan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II berdasarkan

analisis skalogram dan analisis indeks sentralitas berada di desa Passo. Berikut merupakan hirarki pertumbuhan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II : Hirarki I yaitu Desa Passo, Hirarki II yaitu Desa Halong, Hirarki III yaitu Desa Nania dan Hirarki IV yaitu Desa Latta, Kelurahan Lateri, Desa Negeri Lama, Desa Waiheru dan Desa Hunuth. Hasil analisis gravitasi menunjukkan interaksi desa/kelurahan yang paling kuat di SWP II yaitu antara Desa Passo dengan Desa Nania, sedangkan yang paling sedikit interaksinya yaitu Desa Passo dengan Desa Latta.

Rekomendasi

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mengingat rencana persebaran penduduk di SWP II dengan jumlah terbanyak dibanding dengan SWP lainnya. Sehingga tidak terjadi penyimpangan lokasi pada RTRW yang sudah ditetapkan, serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan.
2. Untuk penelitian selanjutnya dalam menentukan lokasi pusat pertumbuhan wilayah dengan berdasarkan kuantitas fasilitas dan kualitas fasilitas yang ada di lokasi penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Baru: Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Alumni, Bandung
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muta'Ali, Lutfi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. Fakultas Geografi, Yogyakarta.
- Muta'Ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Fakultas Geografi, Yogyakarta.
- Nazir, M. Ph.d. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Iwan. 2012. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi. Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Baduouse Media, Padang.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto dkk. 2005. *Pembangunan kota indonesia dalam abad 21 : konsep dan pendekatan pembangunan perkotaan indonesia*. Urban and regional institute (URDI) dan yayasan sugijanto dan soegijoko. FE UI. Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan*

Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta

Yunus, Hadi S. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Skripsi

Danastri, Sasya. 2011. “*Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan*”. Fakultas Ekonomi. Undip

Dita, hesduadiputri. 2007. “*Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang*”. Program pasca sarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip.

Dylla, Novrilasari. 2008. “*Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*”. Fakultas Pertanian. IPB

Fernando, Youbil. 2010. “*Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Overlay Kabupaten Pamekasan Terhadap Propinsi Jawa Timur (Data tahun 2004-2007)*”. Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat

Renhard, Gultom. 2013. “*Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir*”. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Undip

Yulianto, Rahmat. 2015. “*Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes*”. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Undip

Dokumen

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Kota Ambon Tahun 2011-2031

Website

<https://www.scribd.com/doc/207390186/Analisis-Sistem-Pusat-PelayananPermukiman-di-Kabupaten-Magelang-dengan-Analisis-Skalogram-dan-Indeks-Sentralitas-Marshall>